ANALISIS KEDUDUKAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
FAJAR SAPTO SUDONO, RICHO ANDI WIBOWO, S.H., LL.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR ISI

HalamanPersetujuan…… i

HalamanPernyataan…… ii

Kata Pengantar…….. iii

Daftar Isi……... v

Intisari……. viii

Abstract…….. ix

BAB I. PENDAHULUAN……. 1

A. LatarBelakang……..... 1
B. PerumusanMasalah……..... 8
C. TujuanPenelitian……... 9
D. ManfaatPenelitian……..... 10
E. KeaslianPenelitian……. 11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA……. 15

1. PemberantasanTindakPidanaKorupsi…….. 15
2. PenegakanHukumPidana…….. 22
3. Proses PenyelidikandanPenyidikandalamTahapPraAdjudikasi…… 25
4. SekilasMengenaiAparat Internal pemerintah (APIP) danAparatPenegakHukum (APH)……. 29
5. DefinisiOperasional…… 42

BAB III. METODE PENELITIAN……. 45

A. Sifat dan JenisPenelitian……. 45
B. BahanPenelitian…….. 47
C. MetodePengumpulan Data……. 49
D. Analisis Data……..... 50

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…… 53

A. MekanismePenangananLaporanAtauPengaduanMasyarakat Yang BerindikasiTindakPidanaKorupsiPadaPenyelenggaraanPemerintahan Daerah OlehAparatPenegakHukum (APH) Dan AparatPengawas Internal Pemerintah (APIP)…… 53
   1. PengaturanMekanismePenangananLaporanatauPengaduanMasyarakat

UNIVERSITAS GADJAH MADA
ANALISIS KEDUDUKAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
FAJAR SAPTO SUDONO, RICHO ANDI WIBOWO, S.H., LL.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Yang BerindikasiTindakPidanaKorupsiPadaPenyelenggaraanPemerintahan Daerah olehAparatPenegakHukum (APH)…… 53
2. PengaturanMekanismePenangananLaporanatauPengaduanMasyarakat Yang BerindikasiTindakPidanaKorupsiPadaPenyelenggaraanPemerintahan Daerah olehAparatPengawas Internal Pemerintah (APIP... 77
3. AnalisaMekanismePenangananLaporanAtauPengaduanMasyarakat Yang BerindikasiTindakPidanaKorupsiPadaPenyelenggaraanPemerintahan Daerah oleh APIP dan APH…… 97

B. PergeseranPeranAparatPenegakHukum (APH) Dan AparatPengawas Internal Pemerintah (APIP) DalamPenangananLaporanAtauPengaduanMasyarakat Yang BerindikasiTindakPidanaKorupsiPadaPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah…….. 108
1. SekilasMengenaiAparatPengawas Internal Pemerintah (APIP)……. 108
2. SekilasMengenaiAparatPenegakHukum (APH)…… 119
3. AnalisaPergeseranPeranAparatPenegakHukum (APH) Dan AparatPengawasInternal Pemerintah (APIP) DalamPenangananLaporanAtauPengaduanMasyarakat Yang BerindikasiTindakPidanaKorupsiPadaPenyelenggaraanPemerintahan Daerah…… 127

C. KebijakanKerjasama Antara AparatPenegakHukum (APH) Dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) TerkaitPenangananLaporanAtau PengaduanMasyarakat Yang BerindikasiTindakPidanaKorupsiPada PenyelenggaraanPemerintahan Daerah…….. 133
1. Nota KesepahamanantaraKementerianDalamNegeriRepublik Indonesia denganKejaksaanRepublik Indonesia danKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017 danNomor: B/108/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentangKoordinasiAparatPengawas Internal Pemerintah (APIP) DenganAparatPenegakHukum (APH) TerkaitPenangananLaporan AtauPengaduanMasyarakatDalamPenyelenggaraan PemerintahDaerah……. 133
2. PerjanjianKerjasamaantaraKementerianDalamNegeri Republik Indonesia denganKejaksaanRepublik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 119 – 49 TAHUN 2018, Nomor: B-369/F/Fjp/02/2018, danNomor: B/9/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentangKoordinasiAparatPengawas Internal

ANALISIS KEDUDUKAN APARAT PENEGAK HUKUM DAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
LAPORAN ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
FAJAR SAPTO SUDONO, RICHO ANDI WIBOWO, S.H., LL.M., Ph.D.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pemerintah (APIP) DenganAparatPenegakHukum (APH) DalamPenangananLaporanAtauPengaduanMasyarakat Yang Berindikasi TindakPidanaKorupsiPadaPenyelenggaraanPemerintahDaerah…….. 137

3. Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di KejaksaanRepublik Indonesia…… 140

BAB IV. PENUTUP……. 152

A. Kesimpulan……..... 152
B. Saran…….. 157

DAFTAR PUSTAKA…… 159